

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA LEMBANG SALU SARRE KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA UTARA

Marinus Ronal

Universitas Kristen Indonesia Toraja

mronal85@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. Sampel penelitian ini adalah 500 orang dengan jumlah responden 83 orang. Metode penentuan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan hasil Uji-t menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai signifikan sebesar 0,006, Sistem Pelaporan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 serta Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikan 0,007. Kemudian dari hasil Uji- F dengan nilai signifikan 0,000.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas

ABSTRACT

The Influence of Clarity of Budget Targets on Reporting Systems and Community Participation on Village Fund Management Accountability in Lembang Salu Sarre, Sopai District, North Toraja Regency". This study aims to determine the effect of Clarity on Budget Targets, Reporting Systems and Community Participation on Village Fund Management Accountability in Lembang Salu Sarre, Sopai District, North Toraja Regency. The sample of this study was 500 people with all the criteria for consideration with the number of respondents 83 people. The method of determining the sample using the purposive sampling method and collecting data using a questionnaire. Data were analyzed using Classical Assumptions consisting of Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, then Multiple Linear Regression and Coefficient of Determination (R²), as well as Hypothesis Testing consisting of t-test and F-test. Based on the results in this study, it shows that the Clarity of Budget Targets, Reporting Systems and Community Participation have a positive and significant impact on Village Fund Management Accountability. The t-test results show that the Clarity of Budget Targets has a significant value of 0.006, the Reporting System with a significant value of 0.000 and Public Participation has a significant value of 0.007.

Keywords: *Clarity of Budget Targets, Reporting System, Community Participation, Accountability*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi (Astuty, 2013). Pertama, otonomi

provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Agus Suma Arta & Rasmini, 2019).

Terbitnya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa membuat Pemerintah Indonesia mulai mengistimewakan desa sebagai gerbang pembangunan nasional dengan menerbitkan Desa memiliki hak khusus yang disebut Otonomi Desa. Dimana desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri guna membangun dan memajukan perekonomian desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa” Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Ahmad Rudi (2019:209) Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja dari pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui apakah ada penyimpangan atau tidak terhadap anggaran. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Wahyuni, 2014).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan rekan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengukur suatu pemerintahan agar mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat. Hal itu menjadi indikator yang sangat penting bagi prinsip akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2018:40) akuntabilitas pemerintahan dianggap baik apabila: (1) seluruh keputusan yang diambil, baik kolektif maupun individu harus dapat dipertanggungjawabkan; (2) setiap keputusan harus dilaporkan dijelaskan, dan terdapat sanksi yang diberikan jika tidak dilaksanakan dengan baik; dan (3) adanya langkah-langkah efektif untuk menghindari dan memperbaiki penyimpangan administrasi serta tindakan pemerintah yang melanggar sipil. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu Akuntabilitas Vertical (*Vertical Accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Akuntabilitas penting pada pengelolaan dana desa guna menghadirkan kepastian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjadi penghubung kesenjangan diantara pemerintah terhadap rakyat.

Penelitian ini dilakukan pada Lembang Salu Sarre. Lembang Salu Sarre adalah salah satu dusun dari Kecamatan Sopai yang letak strategisnya berada di tengah dua dusun yaitu Dusun Salu Sopai dan Dusun Sopai. Jarak untuk menempuh lembang tersebut dari Kota Rantepao + 13 Km dengan mengendarai roda empat dan roda dua.

Pusat pemerintahan berada pada tangan Kepala Lembang dan di bantu oleh perangkat desa lainnya seperti Kepala Dusun dan RT. Ada Terdapat 3 dusun pada lembang tersebut yaitu: Dusun Sarambu Bayo', Dusun Sarre dan Dusun Belonga.

Kejelasan sasaran pada lembang tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertanggung jawabkan anggaran dana yang di kelolah oleh aparat pada daerah pemerintahan tersebut. Adapun sistem pelaporan pada lembang tersebut, sangat diperlukan untuk memantau hasil kerja, sehingga dengan adanya pelaporan dana anggaran bisa diketahui apakah ada penyimpangan atau tidak.

Akuntabilitas Pada Lembang Salu Sarre ini sangat penting karena dengan adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan guna adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mengelola anggaran tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi guna dalam mencapai tujuan dan kemakmuran serta kesejahteraan dalam lingkup pemerintahan desa tersebut.

1.2 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka persoalan penelitian ini adalah:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara?
4. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara
2. Untuk mengetahui Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara
3. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara
4. Untuk mengetahui Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Toraja Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengetahui Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa khususnya pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Toraja Utara.
2. Bagi Pemerintah
Bagia aparatur desa diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengelola anggaran yang benar sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan khususnya pada Lembang Salu Sarre.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Werner R. Murhadi (2019:1) Laporan Keuangan merupakan bahasa bisnis.

Menurut Kasmir (2019:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Sedangkan menurut Raymond Budiman (2020:3) laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal.

2.1.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Khusaini, (2018:75) dengan adanya anggaran yang jelas, dan juga output yang yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya kejelasan tersebut masyarakat dengan mudah turut mengawasi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Adapun indikator dari Kejelasan Sasaran tersebut antara lain : tujuan, kinerja, standar, jangka waktu dan sasaran prioritas, Putra (2013:6).

2.1.2 Pengertian Sistem Pelaporan

Sistem Pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan system pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Indra Bastian (2010:297)" pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja". Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya system sistem pelaporan yang baik maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara Sistem Pelaporan dapat diukur dari beberapa indikator seperti : penyajian laporan keuangan secara lengkap, informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus, laporan keuangan dapat diuji, informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya Agustin (2018).

2.1.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018:23).

Adanya keterlibatan partisipasi publik diharapkan akan mengarah pada diskusi yang informatif dan kolaboratif diantara pemangku kepentingan tentang ekonomi, sumber daya, masyarakat lokal, lingkungan alam, dan terkait segala aktivitas organisasi. Partisipasi publik merupakan alat penting untuk mengembangkan kemitraan pemahaman dan komitmen yang mana diperlukan untuk memutuskan kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Proses keterlibatan publik harus berusaha untuk menjadi sah, responsive, dan bertanggungjawab. Hal

ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang jelas kepada orang-orang untuk berpartisipasi dengan membuat proses pengambilan keputusan yang transparan serta responsif terhadap masukan publik, baik pikiran, tenaga waktu, keahlian, modal serta materi, sehingga publik dapat melihat bagaimana masukan mereka dipertimbangkan oleh pemangku keputusan. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan beserta masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Dengan penentuan indikator sebagai berikut : keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusul rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, Ulfah Waladiyah (2018) .

2.1.4 Pengertian Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang mandat untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kebijakan dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi mandat (*principal*) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Pada penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah dengan bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Hal ini juga sebagai wujud pemenuhan hak-hak publik dan merupakan tujuan utama Uri reformasi sektor publik (Mardiasmo, 2018:27).

Menurut Imbaruddin, (2019:108) dengan adanya akuntabilitas dapat mencegah pegawai atau lembaga pemetintah menyalahgunakan kekuasaannya. Akuntabilitas pengelolaan dan desa merupakan suatu tanggungjawab pemerintah desa setempat dalam mengelola anggaran, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan pengelolaan anggaran, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan pengelolaan anggaran desa. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mmencapai tujuan yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi ,efektivitas, kejujuran dan kebijakan tertinggi. Adapun indikator dari Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yaitu : kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi ketetapan penyampaian informasi, Faizal & Yaya (2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

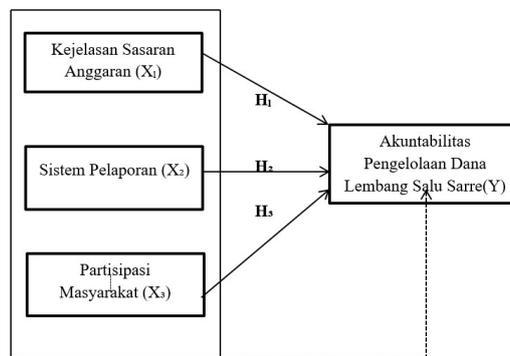
| Nama/Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|---|---|
| I Made Agus Suma Arta & Ni Ketut Rasmini (2019) | Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng). | Hasil penelitian menyatakan bahwa Kejelasan sasaran, system pelaporan beserta partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| Hidayattullah, A, I. H. (2015) | Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke | Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja SKPD |
| Cahyani,M (2015) | Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. | Hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas Kinerja |
| Judarmita, N (2017) | Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa system pelaporan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| Mada, S (2017) | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo | Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. |

Sumber: data diolah (2022)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan rancangan penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman penuntun dalam proses penelitian untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan yang terjadi pada suatu objek yang akan diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang akan digunakan untuk mengaji dan mempermudah persoalan penyelesaian penelitian ini. Untuk lebih jelas dapat dipaparkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Skema 2.1

Sumber: data diolah (2022)

Kerangka konsep penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap penelitian yang dibahas dimana pada penelitian ini digunakan tiga variabel independen terdiri atas Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Sistem Pelaporan Partisipasi (X_2), Partisipasi Masyarakat (X_3) digunakan untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre.

2.3.1. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2018:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa ada hubungan antara:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara
2. Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Toraja Kabupaten Toraja Utara
3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara
4. Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara

BAB III.METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Pada Lembang Salu Sarre ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka angka yang akan

diukur menggunakan statistic sebagai alat uji pengitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan, Sugiyono (2018:13).

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu berada pada Kantor Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Toraja Utara dan seluruh desa yang ada pada lembang tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data Primer merupakan sumber data yang dipeoleh secara langsung dari objek penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden terhadap pernyataan dari penelitian dalam bentuk kuesioner, dan dokumentasi yang berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berupa laporan keuangan Pada Lembang Salu Sarre.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti atau merupakan data yang ada dan menjadi acuan atau arahan dalam penyusunan sebuah penelitian. Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang dipeoleh dari buku, jurnal-jurnal penelitian dan data dari internet yang sudah terpercaya.

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah hasil pengumpulan data dari responden melalui penyebaran kuesioner.

3.4 Populasi dan Sampel

Adapun Populasi dan Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau sebagai bahan penelitian guna mendapatkan hasil yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, Sugiyono (2018:117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada pada daerah lembang tersebut.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang telah memenuhi syarat-syarat kualitas dan karakteristik yang dibutuhkan oleh penulis, Sugiyono (2018:118). Maka untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling* yang merupakan teknik menentukan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, artinya dalam proses sampling ini populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sebuah sampel, Sugiyono (2018:85). Adapun kriteria dalam penelitian ini ditentukan oleh karekteristik responden yang terdiri dari Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, serta Usia.

3.5 Defenisi Operasional Variabel dan Indikator

Menurut Sugiyono, (2018:38) Operasional Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel dan Indikator

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator |
|----------------------------|---|---|
| Kejelasan Sasaran Anggaran | Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka Waktu 5. Sasaran Prioritas (Putra 2013:6) |
| Sistem Pelaporan | Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap 2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi 3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus 4. Laporan keuangan dapat diuji 5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. (Agustin 2018) |
| Partisipasi Masyarakat | Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat baik dalam pembangunan desa maupun pelaksanaan pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam pengambilann keputusan program-program desa 2. Mengusul rencana anggaran 3. Terlibat dalam rapat paripurna 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran (Ulfah Waladiyah 2018) |
| Akuntabilitas | Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban para pembuat kebijakan kepada warga. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuain Prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketetapan penyampaian informasi (Faizal & Yaya (2018) |

Sumber: data diolah(2022)

Dengan melihat tabel 3.1 di atas, maka dapat dilihat bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kejelasan Sasaran Anggaran harus ditetapkan secara spesifik dan jelas, agar setiap orang bertanggungjawab dapat memahami dalam tujuan pencapaian anggaran. Kesesuaian

pelaksanaan dan petanggungjawaban anggaran yang berlaku, serta laporan keuangan yang dapat dimengerti oleh pengguna anggaran. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa serta adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

3.6 Prosedur Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

3.6.1 Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.6.2 Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dengan membaca buku-buku, literature, catatan kuliah, dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

3.6.3 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada objek penelitian yaitu pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Totaja Utara.

Penelitian lapangan yang dilakukan diantaranya:

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam pengisian jawaban, penulis memberikan skor tiap item jawaban dengan skala *likert*. Skala *likert* alat atau cara untuk mengukur pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau kelompok orang mengenai fenomena sosial. Dengan skala *likert* maka variabel yang diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala *likert* memiliki nilai dari sangat positif sampai sangat negative, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Likert

| Simbol | Keterangan | Skor |
|--------|---------------------|------|
| SS | Sangat Setuju | 5 |
| S | Setuju | 4 |
| N | Netral | 3 |
| TS | Tidak Setuju | 2 |
| STS | Sangat Tidak Setuju | 1 |

Sumber : Sugiyono (2016)

b. Observasi

Menurut Sugiyono, (2018:229) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi juga merupakan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung-masalah-masalah yang akan dipelajari di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lebih tepat pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, (Sugiyono,2018:476). Dokumentasi juga merupakan tata cara pengumpulan informasi yang diperoleh dari catatan dan pengambilan

informasi dengan bahan yang dibicarakan di Kantor Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Toraja Utara.

d. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2018:114) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara juga merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban dengan bertanya langsung.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun satuan analisis pada penelitian ini menggunakan seluruh masyarakat Lembang Salu Sarre dengan menentukan karakteristik responden sehingga peneliti mengambil sampel sebanyak 500 Orang. Dengan demikian satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah masyarakat Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 83 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah masyarakat yang menjadi sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Adapun rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Populasi

e : margin or error

$$n = \frac{500}{1 + 500 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{500}{1+5 (0,01)}$$

$$n = \frac{500}{1+5}$$

$$n = \frac{500}{6}$$

$$n= 83$$

Adapun rumus Slovin di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 83 orang.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2012:137). Data diperoleh dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti kepada responden.

Sebelum dilakukan pengujian analisis linear berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik guna untuk mencari

apakah data yang dihasilkan sesuai dengan model yang digunakan sehingga analisisnya dapat dilanjutkan.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar – benar menunjukkan hubungan yang signifikan, yang terdiri dari :

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data digunakan untuk mengetahui hasil dari regresi terdistribusi dengan menggunakan nilai residual apakah sudah teruji secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk Pengujian Normalitas yaitu :

- Apabila data tersebar disekeliling garis – garis diagonal serta mengarah ke garis diagonal atau grafik histogramnya maka hal tersebut menunjukkan distribusi normal, sehingga dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Apabila data tersebar jauh dari garis – garis diagonal dan tidak mengarah ke garis diagonal atau grafik histogram maka hal tersebut menunjukkan distribusi normal, sehingga dapat dikatakan model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolenieritas

Uji Multikolenieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent variable*). Menurut Imam Ghozali (2011:16),” tidak terjadi gejala mutikolonieritas jika nilai toleransi > 0,100 dan nilai VIF < 10,00”. Uji Autokolerasi merupakan pengujian regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2011:139), “ tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) pada gambar *scatter plot* serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y”.

3.7.2 Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda dimana analisis digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis linear berganda pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara Variabel X_1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X_2 (Sistem Pelaporan) dan X_3 (Partusipasi Masyarakat) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembang Salu Sarre), Sugiyono (2018:188). Dalam uji hipotesis penelitian ini terdapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X_1 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X_2 = Sistem Pelaporan

X_3 = Partisipasi Masyarakat

α = Konstanta

β_1 – β_3 = Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen

e = Error

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 (0-1). Nilai koefisien determinasi yang kecil “ berarti keberhasilan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen“.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2018:121) “ Uji t atau Uji Koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen “. Pada penelitian ini untuk melihat apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat apakah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Toraja Utara secara individu. Cara pengambilan keputusan dengan cara :

- a. Apabila nilai signifikan di atas 0,05 ($> 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, itu berarti variabel independen (X_1, X_2, X_3) tidak mempengaruhi variabel dependen secara individu, artinya hipotesis ditolak.
- b. Apabila nilai signifikan di bawah 0,05 ($< 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, itu berarti variabel independen (X_1, X_2, X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipakai untuk mengetahui variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk menguji pengaruh variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Toraja Utara. Cara yang dipakai dalam mengambil kesimpulan dari hasil Uji F yaitu:

- a. Apabila nilai signifikan di atas 0,05 dan nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka itu berarti variabel independen (X_1, X_2, X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama, artinya hipotesis ditolak.
- b. Apabila nilai signifikan di bawah 0,05 ($< 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka itu berarti variabel independen (X_1, X_2, X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama, yang artinya hipotesis diterima.

BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Profil Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lembang Salu Sarre

Lembang Salu Sarre adalah Lembang (Desa) termuda dari semua Lembang yang ada di wilayah Kecamatan Sopai. Terbentuknya Lembang Salu Sarre melalui proses sebagai berikut :

Pada awalnya di Lembang salu Sarre hanya ada satu Lembang yaitu Lembang Salu Sopai. Pada tahun 2003, Lembang Salu dimekarkan menjadi 2 Lembang yaitu Lembang Salu dan Lembang Salu Sopai. Tidak berjalan lama dilakukan kembali perampingan pemerintahan di Tingkat Lembang di Kabupaten Tana Toraja akhirnya Lembang Salu Sopai digabung kembali menjadi 2 Lembang yaitu Lembang Salu dan Lembang Salu Sopai. Pada tahun 2004 Lembang Salu Sopai belum menjadi Lembang Detenitif dimekarkan lagi menjadi 2 Lembang yaitu Lembang Salu Sopai dan Lembang Salu Sarre. Setelah melalui proses yang agak lama maka terbentuklah Lembang Salu Sarre. Dari situlah awal mula terbentuknya Lembang Salu Sarre dimana Lembang Salu Sarre terdiri dari 3 Dusun yaitu :

1. Dusun Salu Sarre
2. Dusun Sarambu Bayo'
3. Dusun Belonga

Adapun batas wilayah daerah Lembang Salu Sarre yaitu:

1. Sebelah Utara : Lembang Salu
2. Sebelah Timur : Lembang Salu Sopai
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Denpina
4. Sebelah Barat : Lembang Salu

Lembang Salu Sarre merupakan salah satu dari 8 (Delapan) lembang/Kelurahabn wilayah Kecamatan Sopai yang terletak 4 Km kearah Barat dari Kota Kecamatan. Lembang Salu Sarre mempunyai luas wilayah seluas 8,9 Km². Dengan iklim Kemarau dan Penghujan.

4.1.2 Visi dan Misi Lembang Salu Sarre

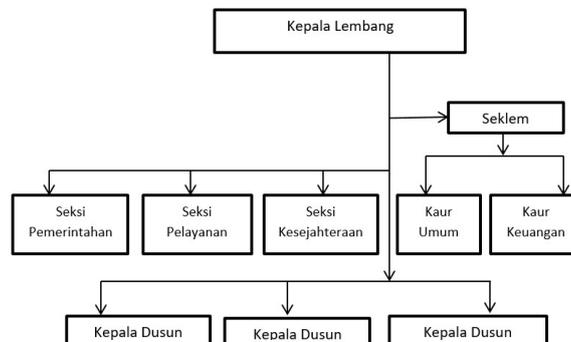
1. Visi

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan tanpa Korupsi, Menuju Masyarakat Salu Sarre yang Cerdas, Maju dan Sejahtera.

2. Misi

1. Revormasi Birokrasi
2. Pelayanan Masyarakat yang Cepat, Akurat dan Maksimal
3. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang

4.1.3 Struktur Organisasi Lembang Salu Sarre



Skema 4.1 Struktur Organisasi Lembang Salu Sarre

4.1.4 Gambaran Umum Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pada pada lembang tersebut dengan berbagai macam pertimbangan dan karakteristik. Responden tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Data yang diolah yaitu jawaban responden mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), Sistem Pelaporan (SP), Partisipasi Masyarakat (PM), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD).

4.1.3 Karakteristik Responden

Adapun responden yang digunakan untuk membantu penelitian ini yaitu seluruh warga masyarakat pada lembang tersebut. Berdasarkan demografi responden maka dapat dipilih berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, dan Usia.

1. Jenis Kelamin

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan persentase jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Persentase Jenis Kelamin

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|--------------|-----------|-------------|
| Laki – laki | 39 | 47% |
| Perempuan | 44 | 53% |
| Total | 83 | 100% |

Sumber : data diolah (2022)

Data yang tersaji diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 atau 53%, dan sisanya adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 39 atau 47%.

2. Pendidikan Terakhir

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan persentase pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Persentase Pendidikan Responden

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|--------------|-----------|-------------|
| SD | 6 | 7,3 % |
| SMP | 13 | 14,6% |
| SLTA | 36 | 43,9% |
| D3 | 9 | 11% |
| S1 | 19 | 23,2% |
| Total | 83 | 100% |

Sumber :data diolah tahun (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menempuh pendidikan lulusan SD sebanyak 6 atau 7,3%, SMP sebanyak 13 atau 14,6%, SLTA sebanyak 36 atau 43%, D3 sebanyak 9 atau 11%, dan pendidikan dengan lulusan S1 sebanyak 19 responden.

3. Pekerjaan

Berikut ini karakteristik responden berdasarakan persentase pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Persentase Pekerjaan Responden

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|-----------------------|-----------|-------------|
| Pegawai | 12 | 14,5% |
| Wiraswasta | 18 | 21,7% |
| Petani | 10 | 12% |
| Mengurus Rumah Tangga | 20 | 24,1% |
| Belum Bekerja | 23 | 27,7% |
| Total | 83 | 100% |

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki pekerjaan Pegawai sebanyak 12 atau 14,5%, Wiraswasta sebanyak 18 atau 21,7%, Petani sebanyak 10 atau 12%, Mengurus Rumah Tangga sebanyak 20 atau 24,1%, dan yang belum bekerja sebanyak 27,7%.

4. Usia

Berikut karakteristik responden berdasarkan berdasarkan persentase usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Persentase Usia Responden

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---------------|-----------|-------------|
| 25 – 30 tahun | 22 | 26,8% |
| 30 – 35 tahun | 9 | 11% |
| 35 – 40 tahun | 17 | 20,7% |
| 40 – 45 tahun | 25 | 30,5% |
| 45 – 50 tahun | 9 | 11% |
| Total | 83 | 100% |

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia 25 – 30 sebanyak 22 atau 26%, usia 30 – 35 sebanyak 9 atau 11%, usia 35 – 40 sebanyak 17 atau 20,7%, usia 40 – 45 sebanyak 25 atau 30,5%, dan untuk usia 45 – 50 sebanyak 9 atau 11% responden.

4.2 Hasil Penelitian

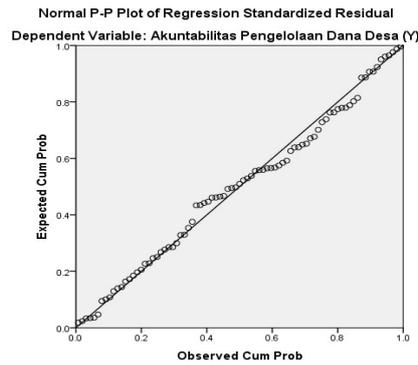
Berdasarkan karakteristik responden diatas, adapun hasil uji pada penelitian ini antara lain :

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji normalitas dilakukan dengan melihat penjabaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik persamaan regresi. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.



Sumber : hasil output SPSS,2022

Skema 4.2 Grafik Normal P-Plot

Berdasarkan Skema 4.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik menyebar dekat dari garis diagonal dan penjabarannya mengikuti arah garis diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena telah memenuhi Asumsi Normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Multi kolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* di atas 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10.

Tabel 4.6
Hasil Uji Mutikolonieritas
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 4.854 | 1.286 | | 3.775 | .000 | | |
| Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) | .210 | .075 | .275 | 2.805 | .006 | .477 | 2.097 |
| Sistem Pelaporan (X2) | .350 | .092 | .395 | 3.820 | .000 | .430 | 2.325 |
| Partisipasi Masyarakat (X3) | .219 | .079 | .243 | 2.760 | .007 | .591 | 1.692 |

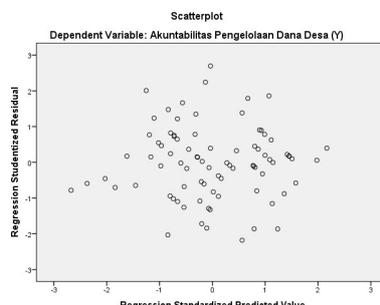
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber : hasil output SPSS,2022

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas nilai *Tolerance* dan *VIF* terlihat bahwa tidak ada nilai *Tolerance* di bawah 0,10 dan nilai *VIF* tidak ada di atas 10 hal ini berarti ketiga variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan *Multikolonieritas*.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut *Heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah model yang terjadi *Heteroskedastisitas*.



Skema 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : hasil output SPSS,2022

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar di atas dan di bawah garis nol. Pola posisi data cenderung berkumpul disatu tempat, yaitu diantara angka -2 dan 2. Namun terdapat pula data (titik-titik) yang menyebar jauh dari angka -2 dan 2. Hal ini menunjukkan tidak terjadi *Heteroskedastisitas* pada model regresi berganda.

4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil *Coefficients*. Pada *Coefficient* yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 4.854 | 1.286 | | 3.775 | .000 | | |
| Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) | .210 | .075 | .275 | 2.805 | .006 | .477 | 2.097 |
| Sistem Pelaporan (X2) | .350 | .092 | .395 | 3.820 | .000 | .430 | 2.325 |
| Partisipasi Masyarakat (X3) | .219 | .079 | .243 | 2.760 | .007 | .591 | 1.692 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber : hasil output SPSS,2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut

:

$$Y = 4,854 + 0,210X_1 + 0,350X_2 + 0,219X_3 + e$$

Berdasarkan model regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persamaan Regresi Linier Berganda di atas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 4,854 dengan tanda positif. Sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan naik sebesar 4,854.
2. Koefisien variabel $X_1 = 0,210$, berarti setiap kenaikan Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,210%
3. Koefisien variabel X_2 sebesar 0,350, bertanda positif menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan Sistem Pelaporan sebesar 1% maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan naik pula 0,350%.
4. Koefisien variabel $X_3 = 0,219$, dengan tanda negative, berarti setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat sebesar 1% akan menyebabkan menurunnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,219%.

4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R^2), yang berbeda antara nol dan satu. Koefisien Determinasi (R^2) dipakai dalam menilai kebenaran relasi dari variabel independen dan variabel dependennya pada suatu persamaan regresi. Koefisien Determinasi (R^2) dipakai dalam menilai kebenaran relasi dari variabel independen dan variabel dependennya pada suatu persamaan regresi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .798 ^a | .637 | .623 | 1.75151 |

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Sistem Pelaporan (X2)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber : hasil output SPSS,2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (*R Square*). Nilai R Square menerangkan tingkat hubungan antara variabel Independen (X) dan variabel Dependen (Y). Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,637 atau sama dengan 63,7% yang artinya variabel X (Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kuat.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini berguna dalam mencari tahu kolerasi varibel Independen (X) dengan variabel Dependennya (Y) secara parsial.

Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

| Model | Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 4.854 | 1.286 | | 3.775 | .000 | | |
| Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) | .210 | .075 | .275 | 2.805 | .006 | .477 | 2.097 |
| Sistem Pelaporan (X2) | .350 | .092 | .395 | 3.820 | .000 | .430 | 2.325 |
| Partisipasi Masyarakat (X3) | .219 | .079 | .243 | 2.760 | .007 | .591 | 1.692 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber : data diolah SPSS,2022

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat menunjukkan bahwa :

1. Variabel Kejelasan Sasaran (X₁) dengan nilai signifikan 0,006 lebih kecil dari 0,05 atau 5% sehingga terjadi kolerasi pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) maka hipotesis diterima atau berpengaruh.
 2. Variabel Sistem Pelaporan (X₂) dengan nilai signifikan 0,000 atau 0% lebih kecil dari 0,05 atau 5% sehingga terjadi kolerasi pada variabel (Y) maka hipotesis diterima atau berpengaruh.
 3. Variabel Partisipasi Masyarakat dengan nilai signifikan 0,007 lebih kecil dari 0,05 atau 5 % sehingga terjadi kolerasi pada variabel (Y) maka hipotesis diterima atau berpengaruh.
2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dimanfaatkan guna menunjukkan kolerasi dari semua variabel independennya seperti Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat secara bersamaan dengan varibel dependennya yakni Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .

Tabel 4.10
Hasil Uji Stimulan (Uji F)

| | | ANOVA ^a | | | | |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 425.524 | 3 | 141.841 | 46.236 | .000 ^b |
| | Residual | 242.356 | 79 | 3.068 | | |
| | Total | 667.880 | 82 | | | |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X₃), Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁), Sistem Pelaporan (X₂)

Tabel 4.10 di atas menampilkan hasil Uji-F dan didapatkan skor nyata signifikan sejumlah 0,000, atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian. diinterpretasikan bahwa kelima variabel seperti Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁), Sistem Pelaporan (X₂), dan Partisipasi Masyarakat (X₃) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh nilai sebesar 0,006 untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, data ini memaparkan variasi Kejelasan Sasaran Anggaran berkolerasi relevan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya Kejelasan Sasaran Anggaran berkolerasi dengan indeks Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran 0,210 yang berarti berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Dilihat dari ini, maka jika nilai Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) ditingkatkan/diturunkan sebesar 1 satuan maka nilai pada indeks Kejelasan Sasaran Anggaran (Y) juga akan meningkat atau menurun sebesar 0,210 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran dalam pemerintahan lembang tersebut maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tersebut akan semakin naik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Hidayatullah (2015) yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4.3.2 Pengaruh Sistem Pelaporan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Nilai signifikan yang diperoleh untuk variabel Sistem Pelaporan (X_2) sebesar 0,000 dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Juga diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Sistem Pelaporan 0,350 yang berarti berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Jika nilai Sistem Pelaporan (X_2) ditingkatkan/diturunkan sebesar 1 satuan, maka nilai indeks Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) juga akan meningkat/menurun sebesar 0,350 satuan, dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel Sistem Pelaporan (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pelaporan berkolerasi nyata pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus Sistem Pelaporan di pemerintahan desa maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan semakin bagus juga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani (2015) yang menyatakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4.3.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) memiliki nilai nyata sebesar 0,007 yang menunjukkan bahwa nilai ini signifikan sebab skor nyatanya adalah $0,007 < 0,05$. Juga diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Partisipasi Masyarakat

sebesar 0,219 yang berarti berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Jika Partisipasi Masyarakat ditingkatkan/diturunkan sebesar 1 satuan, maka nilai indeks Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) juga akan meningkat/menurun sebesar 0,219 satuan, dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada (2017) dan Mahayani (2017) yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4.3.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Sistem Pelaporan dan Partisipasi

Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada Uji F maka dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara bersama-sama berpengaruh positif, signifikan, dan simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Made Agus Suma Arta & Ni Ketut Rasmini (2019), yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB V.PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, dimana dari hasil Uji t menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 2,805, yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} 1,664 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,006 dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.
2. Sistem Pelaporan (X_2) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, dimana dari hasil Uji t menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan memiliki t_{hitung} sebesar 3,820, yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} 1,664 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.
3. Partisipasi Masyarakat (X_3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Kabupaten Toraja Utara, dimana dari hasil Uji t menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat memiliki t_{hitung} sebesar 2,760, yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} 1,166 dengan nilai signifikan sebesar 0,007 dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

4. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat secara bersama - sama berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Yang dibuktikan dengan hasil Uji Determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa nilai koefisien kolerasi sebesar 0,637 atau sama dengan 63,7% yang artinya variabel X (Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat) terhadap Variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) kuat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan antara lain :

1. Bagi Universitas agar menyediakan buku, majalah, artikel atau jurnal dalam bentuk lainnya yang lebih lengkap dan bervariasi untuk kebutuhan referensi mahasiswa, mengingat mahasiswa kesulitan dalam mencari data dan referensi selama pengerjaan Tugas Akhir.
2. Bagi pemerintah lembang harus memperhatikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre, Kecamatan Sopai dengan fokus pada perbaikan Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat .
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan kuesioner dari peneliti yang baru karena kuesioner yang digunakan dibuat sendiri oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suma Arta, I. M., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 709. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p26>
- Artika, D., & Shara, Y. (2021). Analisis Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Medan. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 237–248. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.78>
- Cahyani, M. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(8), 663–676.
- Dewi, Putu Nita Mintria, I Putu Mega Juli Semara Putra, N. P. L. E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–13.
- Frastyo, P., & Publik, K. K. (2019). *Jurusan ilmu administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya 2019*.
- Hidayattullah, A, I. H. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja Skpd Di Merauke, hal.978-979.
- Judarmita, N. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, hal.1719-1746.

- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Cetakan Keenam. Rajawali.Pers
- Leke, A. A. C. M., Irawati, R. I., & Candradewini, C. (2022). *Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pelaksanaan SPIP di Inspektorat Kabupaten Nagekeo*. *Owner*, 6(1), 136–146. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.540>
- Mada, S. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8, hal.106115.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta
- Mardiasmo.(2018b). *Otonomi Manajemen Keuangan Daerah (Tervbaru)*. ANDI: Yogyakarta
- N. Ayularasati, Normajatu, & Fakhriannor. (2011). *Analisis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Electronic Government Di Badan Kepegawaian Daerah, Pelatihan, Dan Pendidikan Kota Banjarmasin*. *Jurnal Sistem Komputer*, 10(2), 49–54.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *JurnalEksplorasiAkuntansi*, 1(1), 429–444. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>
- Rustandi, D. P. P., & Sastika, W. (2021). *Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Brand Fashion Pull And Bear Di Bandung Tahun 2021*. *EProceedings* 7(6), 1–2.
- Safira, N., & Lisma, E. (2022). *Kelas X Smk Swasta Ypi Amir Hamzah Medan*. *Xiii*(1), 256– 267.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Transparansi, P., Kompetensi, D. A. N., Desa, A., & Desa, P. D. (2022). *FAIR VALUE*. 4(3).
- Ukino,(2018). *Pengembangan Penyusunan Anggaran Persediaan Pada Umkm Toko Bangunan Bangkit Jaya-With-Cover-Page-V2*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.